Jurnal Sejarah Indonesia
ISSN Print (2621-1580), ISSN Online (3032-4564)
Volume 9 Nomor 2 2026
https://journal.unhas.ac.id/index.php/jsi

Resistensi Yayasan Jurnal Perempuan terhadap Wacana Ibuisme Masa Orde Baru, 1995-1998

Rifkahana Zurmaningsih,[1*] Nurzengky Ibrahim,[1] Firdaus Hadi Santosa[1]

[1]Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia
Email: rifkahanazz02@gmail.com, nurzengkyibrahim@unj.ac.id, firdaushadi@unj.ac.id

*Korespondensi

Received: 13-10-2025, Revised: 28-10-2026, Accepted: 03-11-2026, Published: 30-11-2026

Abstrak

Penelitian ini membahas resistensi Yayasan Jurnal Perempuan terhadap wacana ibuisme negara pada masa akhir Orde Baru (995-1998). Pada masa pemerintahan Orde Baru, kehidupan sosial-politik dan kebijakan negara membentuk representasi perempuan melalui konsep ibuisme negara yang menempatkan perempuan terutama dalam ranah domestik serta membatasi partisipasi mereka di ruang publik. Berbagai kebijakan dan program pemerintah, seperti PKK, Dharma Wanita, Keluarga Berencana, Undang-Undang Perkawinan, ratifikasi CEDAW, serta pembentukan Menteri Urusan Peranan Wanita, secara formal mengikutsertakan perempuan dalam pembangunan, namun pada praktiknya menjadikan perempuan sebagai objek, bukan subjek, sehingga melegitimasi ketimpangan gender. Penelitian ini menggunakan metode historis dengan pendekatan deskriptif-analitis. Teori ibuisme negara dari Julia Suryakusuma digunakan untuk membaca konstruksi ideologis negara terhadap perempuan, sementara teori *hidden transcript* dan *infrapolitics* dari James C. Scott digunakan untuk menganalisis bentuk resistensi yang dilakukan Yayasan Jurnal Perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan Jurnal Perempuan melakukan perlawanan kultural dan intelektual melalui penyebaran wacana alternatif yang menantang narasi negara. Gerakan Suara Ibu Peduli (SIP) menjadi puncak dari resistensi tersebut dan dinilai mampu memecahkan ruang hening di tengah ketatnya represi pemerintah terhadap masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan dominasi negara pada masa Orde Baru dan bagaimana Yayasan Jurnal Perempuan hadir dalam melawan dominasi tersebut pada representasi perempuan.

Kata Kunci: Ibuisme negara; Orde Baru; Yayasan Jurnal Perempuan; resistensi; wacana

Abstract

This study examines the resistance of Yayasan Jurnal Perempuan (Women's Journal Foundation) to the discourse of state ibuism during the final years of the New Order regime (1995–1998). Under the New Order government, sociopolitical conditions and state policies shaped the representation of women through the ideology of state ibuism, which primarily confined women to the domestic sphere and restricted their participation in public life. Various government policies and programs, including the Family Welfare Movement (PKK), Dharma Wanita, the Family Planning Program, the Marriage Law, the ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), and the establishment of the Ministry for Women's Affairs, formally incorporated women into national development. In practice, however, these initiatives positioned women as objects rather than subjects of development, thereby legitimizing gender inequalities. This study employs the historical method with a descriptive-analytical approach. Julia

Suryakusuma's theory of state ibuism is used to examine the state's ideological construction of women, while James C. Scott's concepts of hidden transcripts and infrapolitics provide an analytical framework for understanding the forms of resistance undertaken by Yayasan Jurnal Perempuan. The findings reveal that Yayasan Jurnal Perempuan engaged in cultural and intellectual resistance by disseminating alternative discourses that challenged dominant state narratives. The Suara Ibu Peduli (SIP) movement marked the culmination of this resistance, breaking the prevailing climate of silence amid the government's severe repression of civil society. This study concludes that the New Order regime exercised ideological dominance over the representation of women and highlights the role of Yayasan Jurnal Perempuan in challenging and resisting this dominance.

Keywords: discourse; New Order; resistance; state Ibuism; Yayasan Jurnal Perempuan



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Gerakan perempuan dalam sejarah Indonesia merupakan bagian dari upaya panjang memperjuangkan kesetaraan gender di tengah konstruksi sosial patriarkal dan kebijakan negara yang membatasi peran perempuan di ruang publik (Djoeffan, 2001; Jati, 2014). Sejak masa pra-kemerdekaan, organisasi perempuan telah berperan aktif dalam perjuangan nasionalisme dan pembentukan negara-bangsa (Novitasari & Soetjipto, 2025; Wirahmat & Alfiyani, 2022). Namun, dinamika tersebut mengalami reposisi signifikan pasca-peristiwa 1965. Pada masa Orde Baru, negara menekan dan mengontrol gerakan perempuan secara masif dengan dalih stabilitas nasional, sehingga partisipasi perempuan diarahkan ke bentuk yang pasif dan terkendali (Suryakusuma, 1996; Wieringa, 1993). Negara mengonsolidasikan organisasi perempuan melalui KOWANI serta membentuk instrumen seperti PKK dan Dharma Wanita untuk melanggengkan domestifikasi (Blackburn, 2004). Meskipun dokumen resmi seperti GBHN, Repelita, dan ratifikasi CEDAW mengklaim komitmen terhadap pemberdayaan perempuan, praktiknya justru menempatkan perempuan sebagai objek pembangunan melalui ideologi ibuisme negara (*State Ibuism*) yang melegitimasi subordinasi perempuan di ruang domestik demi stabilitas rezim (Fitalaya, 1997; Martyn, 2005).

Memasuki akhir masa Orde Baru, khususnya saat krisis ekonomi 1997–1998, represi politik tersebut memicu bentuk resistensi baru yang memanfaatkan celah ideologis negara. Salah satu aktor kunci dalam artikulasi wacana kontradiktif ini adalah Yayasan Jurnal Perempuan (YJP), yang bersama gerakan Suara Ibu Peduli (SIP) melembagakan wacana feminisme kritis dan membalikkan identitas keibuan dari instrumen kontrol menjadi strategi politik perlawanan (Budianta, 2006; Winarnita, 2007). Kendati demikian, masalah utama dalam diskursus ini terletak pada ambivalensi ideologis yang muncul: sejauh mana strategi apropriasi narasi keibuan oleh organisasi seperti YJP efektif membongkar struktur ibuisme negara tanpa terjebak dalam re-domestifikasi wacana gender itu sendiri.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji dinamika gender dan gerakan perempuan pada era Orde Baru hingga pasca-reformasi. Studi klasik Wieringa (2002, 2010) dan Suryakusuma (2011) mendokumentasikan secara mendalam bagaimana mekanisasi ideologi *State Ibuism* menghancurkan gerakan feminisme

radikal pra-1965 seperti Gerwani dan menggantinya dengan organisasi korporatis negara. Selanjutnya, Blackburn (2004) dan Martyn (2005) menganalisis interaksi antara kebijakan pembangunan negara dan kooptasi kelembagaan perempuan. Di sisi lain, Budianta (2006) serta Katjasungkana dan Wieringa (2003) menyoroti kemunculan gerakan Suara Ibu Peduli (SIP) dalam krisis 1998 sebagai bentuk *subversive motherhood* di mana simbol-simbol keibuan digunakan sebagai alat protes politik di ruang publik.

Meskipun kajian mengenai ibuisme negara dan gerakan perempuan krisis 1998 cukup melimpah, terdapat perbedaan mendasar dan keterbatasan pada studi-studi terdahulu. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menempatkan *State Ibuism* sebagai ideologi hegemonik yang monolithik (Fitalaya, 1997; Suryakusuma, 1996), mengkaji propaganda gender negara secara umum (Akbar, 2021), atau mengandalkan narasi aksi massa Suara Ibu Peduli semata sebagai peristiwa politik demonstratif (Budianta, 2006). Belum ada studi yang secara mendalam membedah bagaimana Yayasan Jurnal Perempuan (YJP) secara khusus mengonstruksi resistensi berbasis media dan diskursus intelektual kritis untuk mendekonstruksi wacana resmi negara tersebut di penghujung rezim otoriter.

Letak kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini berada pada fokus analisisnya terhadap tekstualitas dan gerakan diskursif YJP sebagai bentuk *counter-hegemoni* intelektual di tengah represi politik late-Orde Baru. Penelitian ini membedah bagaimana YJP melegitimasi feminisme kritis tidak hanya lewat aksi lapangan, melainkan lewat produksi pengetahuan alternatif yang mendekonstruksi makna kodrat, keibuan, dan hak-hak sipil perempuan (Hendrastiti & Irianto, 2025; Katjasungkana, 2025).

Berdasarkan kesenjangan literatur tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk dan strategi resistensi Yayasan Jurnal Perempuan (YJP) terhadap wacana ibuisme negara pada masa akhir Orde Baru. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana YJP memanfaatkan celah ideologis rezim otoriter guna mengartikulasikan feminisme kritis di Indonesia, serta memahami implikasi resistensi diskursif tersebut bagi pembentukan gerakan perempuan di era transisi demokrasi.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode historis yang meliputi tahapan pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 1994). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan sumber primer berupa wawancara dengan pelaku sejarah dan Jurnal Perempuan yang diterbitkan oleh Yayasan Jurnal Perempuan, dan sumber sekunder berupa buku serta artikel jurnal yang relevan. Verifikasi sumber dilakukan melalui kritik eksternal dan internal untuk memastikan keabsahan data. Fakta sejarah yang diperoleh kemudian dianalisis dan diinterpretasikan menggunakan teori ibuisme negara dari Julia Suryakusuma serta konsep *hidden transcript* dan *infrapolitics* dari James C. Scott (1989, 1990) guna memahami bentuk resistensi Yayasan Jurnal Perempuan. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk historiografi yang sistematis dan analitis.

Hasil dan Pembahasan

Konteks Sosial-Politik Pemicu Wacana Ibuisme Negara

Peristiwa Gerakan 30 September 1965 menjadi titik balik dalam pembatasan gerakan perempuan di Indonesia. Peristiwa yang menandakan krisis nasional pada waktu tersebut turut menyeret nama Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) sebagai salah satu pelaku dalam kejadian tersebut berdasarkan kedekatan ideologis Gerwani dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) (Pradita, 2020). Kampanye hitam dan propaganda gender yang dilancarkan setelahnya menggambarkan Gerwani sebagai ancaman moral dan politik di mana membentuk persepsi masyarakat atas keterlibatan perempuan dalam politik merupakan sesuatu hal yang berbahaya bagi tatanan sosial (Anggraini, 2025; Husna & Adiyuka, 2025). Ribuan anggota Gerwani ditangkap, dibunuh, atau dipenjara tanpa proses pengadilan yang adil (Novitasari & Widyani, 2025). Penumpasan Gerwani kemudian menjadi langkah awal Orde Baru dalam merepresi gerakan perempuan secara lebih luas. Wieringa (1988) menjelaskan bahwa Gerwani dijadikan memori traumatik kolektif untuk menanamkan ketakutan dan membatasi aktivisme politik perempuan di masa berikutnya.

Dengan demikian, penghancuran Gerwani bukan hanya mengakhiri satu organisasi perempuan, tetapi juga menjadi dasar bagi Orde Baru untuk membangun wacana bahwa aktivitas politik perempuan merupakan penyimpangan dari kodratnya. Politik diposisikan sebagai wilayah berbahaya bagi perempuan, sehingga perempuan harus "dikembalikan" ke ranah domestik demi menjaga moral dan stabilitas sosial (Printina, 2019). Dalam kondisi tersebut, organisasi perempuan yang masih bertahan terpaksa menyesuaikan identitas dan strategi gerakannya agar dapat terus eksis di bawah kontrol negara. Organisasi-organisasi perempuan yang sebelumnya bersifat progresif, independen, dan memiliki basis massa yang kuat di tingkat akar rumput secara perlahan menghilang dari lanskap politik Indonesia. Hal ini bukan hanya membungkam organisasi tertentu, tetapi juga membatasi secara sistematis ruang gerak politik perempuan di Indonesia pada masa Orde Baru (Arivia & Subono, 2017).

Dalam memandang pembatasan terhadap gerakan perempuan diperlukan pandangan yang lebih jauh bagaimana pemerintah Orde Baru menguatkan kontrol terhadap masyarakat melalui penyederhanaan dan rekristalisasi partai politik (Hidayat, 2018; Rizqi, 2022). Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto sejak 1966 mengedepankan sistem otoritarian yang sangat mengontrol kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Konsep dasar dari politik Orde Baru terdiri dari stabilitas politik, teknokratis, dan efisiensi birokrasi dengan gaung perjuangan pemerintahan yakni "pembangunan nasional", "stabilitas nasional", "anti komunis", serta "asas kekeluargaan" yang menjadi dasar bagi penerapan Undang-undang Dasar 1945. Dari hal-hal tersebut, kemudian Rezim Orde Baru dikenal dengan sebutan "otoritarianisme pembangunan".

Ignas Kleden (2001) menjelaskan dengan tipologi sederhana mengenai karakteristik otoritarianisme pemerintah Orde Baru dalam mengatur kehidupan Indonesia. Pertama adalah represi atau penggunaan kekuatan fisik berupa ancaman senjata, teror, intimidasi, penculikan, atau penjara dalam memaksakan kehendak pihak lain. Dalam sudut pandang hukum, kekerasan ini dapat diberlakukan pada sekelompok orang atau individu yang dianggap melakukan hal yang membahayakan

negara. Di mana dalam rumusan 'tindakan membahayakan negara' sendiri tidak sejelas dalam isi dan batasannya, yang dilakukan dengan dasar menjaga stabilitas negara. Kedua adalah dominasi struktural yang menyebabkan adanya berbagai ketimpangan dalam kekuatan sosial terlebih dalam kehidupan politik di Indonesia kala itu. Ketidakseimbangan itu terlihat mencolok antara negara dan masyarakat, antara pemerintah dan rakyat, antara birokrasi dan warga negara, antara partai yang didukung pemerintah atau *the ruling party* dan partai politik lainnya, antara legislatif dan eksekutif, atau antara ABRI dan sipil. Ketiga, terjadinya kekerasan kultural yang disebut dengan hegemoni pemerintah terhadap kehidupan sosial budaya Indonesia (Hutagalung, 2004). Pihak satu yakni pemerintah dapat memproduksi makna, sedangkan pihak lain hanya menjadi konsumennya. Hegemoni makna merupakan sebuah pemaksaan yang seakan-akan terjadi secara bebas dan sukarela, bahkan banyak yang tidak sadar akan pemaksaan hal tersebut. Dalam proses hegemoni, diperlukan sebuah kemasan yang membungkus kepentingan sendiri dengan kepentingan lain sehingga terlihat seakan mewakili kepentingan umum.

Hegemoni ini dapat tergambarkan dari wacana pemerintah mengenai konsep kodrat. Kodrat digunakan pemerintah Orde Baru dalam memperkuat kontrol sosial dan menjaga stabilitas politik. Dalam wacana ini, perempuan diposisikan sebagai istri yang mendampingi suami serta sebagai ibu yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak, pengelolaan rumah tangga, dan penjagaan harmoni keluarga. Dengan demikian, peran perempuan dilekatkan pada stabilitas keluarga yang dipandang sebagai fondasi utama stabilitas negara, sehingga memperkuat struktur patriarki dalam kehidupan sosial dan politik (Achidsti, 2021). Mansour Fakih (1996) menjelaskan bahwa pada masa ini, pengertian mengenai kodrat dan gender kerap dipertukarkan. Kodrat seharusnya merujuk pada perbedaan biologis yang bersifat alamiah, sedangkan gender merupakan konstruksi sosial yang membentuk peran, sifat, tanggung jawab, dan perilaku berdasarkan budaya serta lingkungan sosial (Anshori et al., 1997). Pertukaran makna ini mengakibatkan *gender blind* dalam kebijakan negara serta masyarakat dalam memahami gender sebagai faktor penentu atas pilihan-pilihan yang tersedia bagi perempuan dan laki-laki. Akibatnya adalah penetapan peran ideal bagi laki-laki dan perempuan.

Pada masa Orde Baru, meski telah dibuka kesempatan perempuan terlibat dalam ruang publik, tetapi pandangan bahwa perempuan belum dianggap 'utuh' jika tidak menjalankan peran domestiknya memberikan peran ganda terhadap perempuan sendiri. Karena perempuan dipandang sebagai penanggung jawab utama dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kerangka ini, pengabdian perempuan sebagai ibu dan istri dipandang sebagai bagian dari kewajiban moral untuk mendukung pembangunan nasional (Fathimah, 2021). Wacana ini sendiri tercermin dalam Panca Dharma Wanita berikut:

1. Wanita sebagai pendamping suami
2. Wanita sebagai pengelola rumah tangga
3. Wanita sebagai penerus keturunan dan pendidik anak
4. Wanita sebagai pencari nafkah
5. Wanita sebagai warga masyarakat

Langkah pemerintah dalam hegemoni citra perempuan yang berkewajiban pada keluarga, secara tidak langsung membebankan kesejahteraan keluarga ada

pada perempuan atau seorang ibu. Ini berakibat pada pemahaman kepada kehidupan perempuan di Indonesia menyempit, di mana tolak ukur keberhasilan perempuan dilihat dari bagaimana ia mengurus keluarga (Dewi & Kusuma, 2014). Suryakusuma (2011) menyebut konstruksi ideologis ini sebagai ibuisme negara, yaitu ideologi gender yang mendorong domestifikasi perempuan dalam bidang ekonomi, politik, budaya, dan ideologi. Negara Orde Baru melanggengkan dan melembagakan wacana ini secara sistematis melalui berbagai kebijakan dan institusi sosial, sehingga perempuan tidak lagi ditempatkan sebagai rekan setara dalam kehidupan sosial dan politik, melainkan sebagai pendukung dari belakang dalam peran keibuan dan kepatuhan domestik (Rafika & Ardhana, 2025).

Perkembangan Kebijakan yang Menguatkan Wacana Ibuisme

Pada masa Orde Baru, arah kebijakan negara terhadap perempuan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-politik Indonesia maupun dinamika internasional. Pada 1974, Pemerintah meresmikan Undang-Undang Perkawinan yang merupakan regulasi nasional pertama yang secara khusus mengatur persoalan perkawinan di Indonesia. Dalam sejarah hukum di Indonesia, UU ini adalah pengakuan negara terhadap perempuan sebagai subjek hukum yang sama, di mana membuka pengakuan bahwa istri dan suami memiliki kedudukan yang setara sebagai subjek hukum, baik di dalam keluarga maupun dalam pergaulan sosial. Namun di lain sisi, UU ini juga mengokohkan pembagian peran gender yang bersifat stereotip. Dalam Pasal 31 ayat (3) yang berbunyi 'suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga' dan Pasal 34 ayat (1), 'suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya' dan Pasal 34 ayat (2), 'istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya'. Kedua pasal tersebut kemudian dikenal sebagai pasal pembakuan peran gender. Melalui ketentuan ini, negara tidak hanya mengatur hubungan dalam rumah tangga, tetapi juga melegitimasi dan membakukan pembagian kerja seksual antara laki-laki dan perempuan di dalam keluarga (BPHN, 2007).

Selain dalam UUP, GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) 1988-1993, pada bagian “Peranan Wanita dalam Pembangunan Bangsa”, ditegaskan bahwa perempuan memiliki hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Namun, kesetaraan tersebut secara eksplisit diarahkan agar sesuai dengan “kodrat, harkat, dan martabat sebagai wanita”, serta dikaitkan erat dengan peran perempuan sebagai pengembang keluarga dan pendidikan generasi muda menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pembangunan tetap dibingkai dalam fungsi reproduktif dan domestik (Blackburn, 2004; Suryakusuma, 1996).

Terlepas dari berbagai dokumen resmi negara yang melegalisasi peran domestik sebagai tanggung jawab utama perempuan, masa Orde Baru juga terkenal akan program Keluarga Berencana (KB) yang menjadi salah satu kebijakan negara dalam upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk Indonesia (Rachmadi, 2019; BKKBN, 2025). Program ini dilakukan sebagai program massal yang secara praktis menempatkan perempuan sebagai aktor utama (Amaliatulwalidain & Novia, 2018). Di dalam pelaksanaan program KB, tubuh perempuan beroperasi di bawah setidaknya tiga bentuk kekuasaan, yakni: kekuasaan negara melalui regulasi dan propaganda, kekuasaan medis melalui definisi kesehatan reproduksi, dan

kekuasaan sosial-budaya melalui norma gender. Dalam wacana seksualitas, perempuan sering kali dianggap sebagai penyebab alami dari ledakan penduduk, seolah-olah merekalah pihak yang bertanggung jawab atas tingginya angka kelahiran. Persepsi ini lahir dari konstruksi sosial bahwa perempuan adalah pihak yang mengalami kehamilan dan persalinan, sehingga fungsi reproduksi dilekatkan sebagai tanggung jawab eksklusif mereka (Udasmoro, 2004). Hal ini juga menjelaskan mengapa kader KB mayoritas perempuan, meskipun secara konsep dapat berasal dari laki-laki maupun perempuan. Keterlibatan laki-laki lebih rendah karena peran gender tradisional menempatkan mereka sebagai pencari nafkah, sementara urusan reproduksi dianggap sebagai ranah domestik perempuan (Wardhana, 2017).

Kemudian, rekonstruksi peran perempuan sebagai penopang stabilitas nasional dengan peran domestiknya, dirumuskan dan dipromosikan pemerintah Orde Baru melalui figur 'ibu yang baik' atau ibu rumah tangga ideal melalui organisasi-organisasi perempuan bentukan negara. Organisasi ini secara sistematis menanamkan nilai kepatuhan, pengabdian kepada suami, dan keterikatan dengan ranah rumah tangga. Organisasi perempuan bentukan negara ini tersebar di berbagai sektor, mulai dari lingkup keluarga hingga pegawai negeri.

a. Kongres Wanita Indonesia (Kowani)

Kowani sebenarnya adalah organisasi federasi perempuan tertua di Indonesia yang berdiri pada 1928, yang dibentuk sebagai wadah persatuan berbagai organisasi perempuan yang memiliki visi memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama dalam bidang pendidikan, perkawinan, dan keterlibatan politik. Meski dalam perkembangannya, posisi Kowani di Indonesia terpengaruh oleh dinamika politik nasional. Saat Orde Baru memulai pemerintahannya, partai Golkar (Golongan Karya) menaikkan jumlah wakil mereka dalam pengurus eksekutif Kowani. Kowani pada saat ini menjadi payung bagi kurang lebih 50 organisasi perempuan di Indonesia, sebagai perpanjangan tangan bagi pemerintah terhadap pembatasan gerakan organisasi perempuan (Amini, 2021).

b. PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga)

PKK merupakan organisasi perempuan yang sangat penting di masa Orde Baru, pembentukannya bertujuan tidak hanya untuk peningkatan kesejahteraan keluarga, tetapi juga sebagai instrumen negara dalam membentuk dan mengarahkan peran perempuan di tingkat akar rumput. Program-program ini dicanangkan sebagai alat bantu keperluan pembangunan yang dijalankan pemerintah, yakni: 1) P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila); 2) Gotong Royong; 3) Gizi; 4) Sandang; 5) Perumahan dan tatalaksana rumah tangga; 6) Pendidikan dan keterampilan; 7) Kesehatan dasar; 8) Koperasi; 9) Perlindungan dan pelestarian lingkungan; 10) Perencanaan rumah tangga. Sepuluh Program Pokok PKK tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas perempuan diarahkan terutama pada ranah domestik, moral, dan sosial, dengan penekanan kuat pada peran perempuan sebagai pengelola rumah tangga dan penjaga kesejahteraan keluarga (Suryakusuma, 1996).

c. Dharma Wanita

Selain PKK dan Kowani, organisasi perempuan yang memperoleh perhatian khusus pada masa Orde Baru adalah Dharma Wanita. Organisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah istri pegawai negeri sipil, tetapi juga menjadi instrumen negara dalam mengatur dan mengarahkan peran perempuan di lingkungan birokrasi pemerintahan. Dharma Wanita sendiri memiliki hierarki kepengurusan yang telah ditentukan dari tingkat pusat hingga tingkat kecamatan, di mana jabatan ini biasanya segaris lurus dengan jabatan suami dalam pemerintahan (Amini, 2021).

Lebih jauh mengenai penyatuan perempuan ke dalam organisasi seperti Dharma Wanita dan PKK tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan politik elektoral. Perempuan dipandang sebagai populasi yang besar dan sebagai kekuatan sosial-politik yang potensial, khususnya dalam mendukung perolehan suara Partai Golkar dalam pemilu. Dalam praktiknya, anggota Dharma Wanita dan PKK di berbagai daerah diwajibkan untuk terlibat dalam kampanye Golkar. Melalui PKK, Dharma Wanita, dan Kowani, negara tidak hanya mengatur peran perempuan dalam ranah domestik dan sosial, tetapi juga memobilisasi perempuan sebagai kekuatan politik yang mendukung kekuasaan Orde Baru, sekaligus membatasi otonomi dan daya kritis perempuan dalam kehidupan publik (Fathimah, 2021; Hadiz, 2004).

Pemerintah Orde Baru sebenarnya menempuh langkah lain dalam mengakomodasi isu perempuan dalam pembangunan, tak hanya melalui organisasi massa tetapi juga melalui pembentukan lembaga formal di tingkat kementerian. Pemerintah Orde Baru kemudian membentuk jabatan Menteri Muda Urusan Peranan Wanita yang kemudian ditingkatkan menjadi Kementerian Negara Urusan Peranan Wanita (MenUPW). Pembentukan kementerian ini didorong oleh pandangan bahwa organisasi-organisasi perempuan memiliki potensi besar untuk membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas dan mendukung agenda pembangunan nasional (KemenPPPA, 2025).

Perkembangan peran MenUPW ini juga tidak dapat dipisahkan dari dinamika kebijakan perempuan di tingkat internasional. Tahun 1984 menjadi tonggak penting dengan diratifikasinya Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) oleh Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Indonesia menyatakan kesediaannya untuk tunduk dalam ketentuan internasional mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Secara formal, hal ini menunjukkan komitmen politik Indonesia untuk menempatkan isu kesetaraan gender dalam kerangka pembangunan nasional. Tetapi keberadaan MenUPW dan ratifikasi CEDAW pada masa Orde Baru lebih banyak berfungsi sebagai simbol formal bahwa negara memberi perhatian terhadap isu perempuan, daripada menghadirkan perubahan nyata dalam relasi gender. Secara wacana, negara memang menunjukkan komitmen terhadap pemberdayaan dan penghapusan diskriminasi, tetapi pada tingkat kebijakan dan praktik, berbagai regulasi dan program yang telah dijelaskan sebelumnya justru melanggengkan wacana ibuisme (BPHN, 2007).

Penyebaran wacana ibuisme negara ini membawa dampak yang luas terhadap kehidupan perempuan, baik di ranah politik, sosial, maupun ekonomi (Setiyawan & Wahyuni, 2023). Kritik feminisme terhadap representasi perempuan pada masa Orde Baru menunjukkan bahwa negara tidak netral gender. Tetapi sebaliknya, negara menjadi agen utama dalam memperkuat tatanan patriarki melalui kebijakan,

simbol, dan narasi nasionalisme yang bias gender. Negara memposisikan peran gender secara normatif dan hierarkis, yang menjadikan perempuan sebagai alat ideologis untuk mendukung stabilitas dan tatanan sosial, bukan sebagai agen transformasi sosial. Perempuan dalam hal ini diposisikan sebagai pendukung pasif, pelengkap dalam pembangunan, bukan subjek utama yang berdaulat. Dalam wacana nasionalisme, perempuan dipandang sebagai simbol moral bangsa penjaga budaya, atau alat reproduksi warga negara ideal, bukan warga negara yang memiliki hak politik penuh dan ruang partisipasi aktif (Asriani, 2022).

Bukan hanya berakibat pada ruang gerak perempuan yang terbatas dalam ruang publik, tetapi konstruksi tersebut juga berdampak pada munculnya ketimpangan sosial dan ekonomi. Anggapan bahwa perempuan hanyalah pencari nafkah tambahan menjadi justifikasi atas ketimpangan upah antara buruh laki-laki dan buruh perempuan, terutama di sektor industri padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja perempuan (Robinson, 2012). Ketergantungan ekonomi tersebut memperkuat relasi kuasa patriarkal dalam rumah tangga, di mana posisi suami dikonstruksikan sebagai pencari nafkah utama, sementara perempuan ditempatkan sebagai pengelola rumah tangga yang bergantung pada pendapatan laki-laki (Robinson, 2012). Selain itu, kerja domestik berbayar seperti pekerja rumah tangga tidak dipandang sebagai kerja produktif yang layak dilindungi negara.

Dalam aksi organisasi perempuan pun hanya terfokus dalam berbagai pemberdayaan perempuan di berbagai daerah, sekaligus juga memperhatikan penindasan kaum perempuan yang ada (Fatimah, 2007). Umumnya organisasi perempuan yang masih bertahan di Orde Baru banyak berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sehingga sifatnya non-politis. Meski mereka juga tetap mengadvokasi dan tak jarang menyuarakan mengenai hak kesetaraan bagi perempuan. Represi terhadap perempuan yang bersuara di ruang publik tidak hanya terjadi dalam bentuk intimidasi administratif, tetapi juga dapat berujung pada kekerasan fisik. Contoh lain yang menunjukkan bagaimana perempuan yang bersuara di ruang publik dianggap melampaui batas 'kodratnya' dapat terlihat pada kasus kekerasan dan pembunuhan terhadap buruh perempuan Marsinah (Gunharsa et al., 2022). Marsinah melanggar apa yang disebut negara terhadap sosok perempuan ideal yang tunduk, dan apolitis.

Dikotomi antara bidang publik dan ranah privat yang dibangun melalui pembagian peran kerja secara seksual sebenarnya tidak selalu menjadi persoalan, selama tidak ada penindasan terhadap salah satu ranah tersebut. Namun dalam kenyataannya, kehidupan di ranah privat justru sarat dengan berbagai bentuk ketidakadilan. Berbagai persoalan seperti kekerasan dalam rumah tangga, aborsi yang tidak aman, pelecehan terhadap kerja domestik, serta beban ganda yang dipikul perempuan menunjukkan bahwa ruang privat bukanlah ruang yang netral dari relasi kuasa. Pada akhirnya, situasi ini menimbulkan ketimpangan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pada titik ini menjadi jelas bahwa kebijakan yang dihasilkan di ranah publik akan berpengaruh langsung terhadap kondisi di ranah privat, begitu pula sebaliknya. Keduanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan sepenuhnya (Arivia, 1999).

Dalam konteks Orde Baru, konstruksi keibuan ideal ini menjadi bagian dari strategi ideologis negara untuk mengatur tubuh, emosi, dan peran sosial perempuan, sekaligus membatasi kemungkinan perempuan hadir sebagai subjek

politik yang otonom. Sehingga berbagai kritik feminis terhadap konstruksi keibuan ideal tidak sekadar merupakan penolakan terhadap peran domestik, tetapi merupakan upaya untuk mengungkap pengalaman, ketidakadilan, dan keterbatasan perempuan yang selama ini disembunyikan di balik citra "ibu" yang dibentuk negara. Ketegangan ini menjadi salah satu titik tolak munculnya berbagai bentuk resistensi perempuan terhadap ibuisme negara di penghujung Orde Baru, termasuk melalui wacana, kajian, dan advokasi yang kemudian dilakukan oleh Yayasan Jurnal Perempuan.

Strategi Resistensi Yayasan Jurnal Perempuan terhadap Wacana Ibuisme Negara

Yayasan Jurnal Perempuan digagas oleh Dr. Gadis Arivia, seorang dosen feminisme dan filsafat di Departemen Filsafat Universitas Indonesia pada tahun 1995. Pendirian ini didukung oleh Dr. Ida Dhanny, Asikin Arif, MA, serta Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi (Yayasan Jurnal Perempuan, n.d.). Gagasan penerbitan Jurnal Perempuan muncul karena pada masa itu para mahasiswa Universitas Indonesia kesulitan dalam mendapatkan referensi kajian perempuan berbahasa Indonesia. Sebagai jurnal feminis pertama di Indonesia, Jurnal Perempuan telah menjadi salah satu rujukan utama dalam kajian gender dan feminisme di Indonesia. Kegiatan riset dan penulisan akademik yang dilakukan JP berangkat dari komitmen terhadap prinsip-prinsip feminisme. Pada masa awal pendiriannya, YJP mengembangkan sejumlah strategi penting dalam memperjuangkan hak perempuan di tengah keterbatasan ruang publik era Orde Baru. Dengan memadukan produksi pengetahuan feminis, advokasi berbasis riset, jembatan antara aktivisme dan akademik, serta penguatan jaringan, YJP berhasil meneguhkan perannya sebagai pelopor produksi wacana feminis di Indonesia pada masa awal pendiriannya (Yayasan Jurnal Perempuan, 1995).

Sebagai respons terhadap pelanggengan wacana ibuisme dan penyempitan ruang gerak perempuan pada masa Orde Baru, para aktivis feminis dari YJP membangun bentuk-bentuk resistensi yang tidak selalu tampil dalam bentuk konfrontasi terbuka dengan negara. Pertama adalah dengan cara penyebaran pengetahuan feminis. Pemilihan tema-tema dalam Jurnal Perempuan dilakukan melalui diskusi dalam tim redaksi, dengan mempertimbangkan urgensi isu yang relevan, bukan secara sembarangan. Setiap isu yang dibahas dalam jurnal tersebut menggunakan kritik dalam lensa feminis. Gadis Arivia menjelaskan bahwa ada perbedaan antara 'lensa perempuan' dan 'lensa feminis'. Di mana lensa perempuan lebih umum, yaitu melihat apakah perempuan terlibat dalam suatu hal atau suatu pembangunan mendukung perempuan. Sedangkan lensa feminis lebih dalam, karena berfokus pada pembongkaran ketidakadilan, diskriminasi, dan penindasan terhadap perempuan yang terjadi.

Tabel 1. Data Jurnal Perempuan edisi 1-8 yang terbit di tahun 1996-1998.

Edisi	Tahun Terbit	Judul
01	1996	Mengapa Perempuan Disiksa
02	1997	Prostitusi Berkah atau Kutukan?
03	1997	Bias Gender dalam Pemahaman Agama
04	1997	Rahim ini Miliki Siapa
05	1998	Dampak Pembangunan Terhadap Perempuan

06	1998	Siapa Bercermin ke Siapa?
07	1998	Politik Bergejolak Perempuan di Mana?
08	1998	Pemerintah yang Berdiri di Atas Darah Perempuan

Sumber: (Yayasan Jurnal Perempuan, n.d.)

Secara garis besar, edisi-edisi awal Jurnal Perempuan (JP 1–8) menunjukkan konsistensi agenda intelektual feminis yang berupaya membongkar berbagai bentuk ketidakadilan struktural terhadap perempuan dalam ranah sosial, budaya, ekonomi, politik, hingga tubuh dan seksualitas. Tema-tema yang diangkat mulai dari kekerasan terhadap perempuan, prostitusi, bias gender dalam agama, hak reproduksi, hingga dampak pembangunan menegaskan bahwa persoalan perempuan tidak dapat dipahami sebagai masalah individual atau moral semata, melainkan berakar pada relasi kuasa yang timpang dan dilembagakan melalui kebijakan negara, wacana agama, praktik ekonomi, serta representasi budaya. Melalui pendekatan feminis kritis, Jurnal Perempuan secara konsisten menantang narasi dominan Orde Baru yang menempatkan perempuan sebagai subjek domestik, apolitis, dan pelengkap laki-laki.

Selain dengan penyebaran pengetahuan feminis, Gadis Arivia sebagai penggagas dan pendiri YJP, menekankan pentingnya menggabungkan kemampuan teori dengan kapasitas praktik. Melalui perannya sebagai akademisi dan aktivis feminis, Gadis Arivia menyatakan bahwa pemikiran feminisme memiliki tanggung jawab untuk mendorong perubahan melalui diskursus dan tindakan. YJP telah berkontribusi dalam memperkuat gerakan perempuan di Indonesia, dengan salah satu momen penting keterlibatannya terjadi pada tahun 1998 (Putri et al., 2022). YJP yang sebelumnya aktif dalam bidang akademik, kemudian menggelar aksi publik pertamanya dengan mengusung nama “Suara Ibu Peduli” yang dilaksanakan pada 23 Februari 1998.

Salah satu pemicu dari tercetusnya inisiasi gerakan ini adalah kerja sama dengan UNIFEM dalam kampanye anti-kekerasan terhadap perempuan, yang kemudian berkembang menjadi diskusi rutin tentang krisis ekonomi, sosial, dan politik Indonesia menjelang 1998. Dari diskusi ini, para aktivis perempuan menyadari bahwa krisis ekonomi tidak bisa dipisahkan dari kegagalan politik Orde Baru (Arivia, 2007).

Dalam situasi politik yang sangat represif, para aktivis perempuan merancang strategi perlawanan yang aman namun bermakna. Mereka memilih menggunakan identitas “ibu” karena peran keibuan lebih diterima negara saat itu. Dari sinilah lahir gerakan Suara Ibu Peduli (SIP), yang secara simbolik mengangkat isu kenaikan harga susu sebagai cara menyampaikan kritik politik tanpa menyebutkan tuntutan secara langsung (Subono, 1999). Isu susu dipilih bukan hanya karena harganya mahal, tetapi juga sebagai simbol politik terselubung. “Turunkan harga susu” dimaknai sebagai kritik terhadap Soeharto dan rezim Orde Baru. Simbol ini diperkuat dengan aksi nyata, yaitu penjualan susu murah kepada masyarakat, yang mendapat respons besar dan menjadi ruang ekspresi keresahan publik terhadap kondisi ekonomi dan politik. Aksi SIP dilaksanakan pada 23 Februari 1998 di Bundaran Hotel Indonesia dengan strategi yang sangat terencana, mulai dari kode payung, penggunaan bahasa simbolik di spanduk, hingga pembacaan doa dan puisi. Aksi damai ini berlangsung singkat dan berakhir dengan penangkapan tiga aktivis

perempuan. Meski dikemas secara lembut, negara tetap memandang aksi ini sebagai ancaman politik (Arivia et al., 2025).

Media pada saat itu banyak menggambarkan SIP hanya sebagai aksi "ibu-ibu kelas menengah" yang peduli harga kebutuhan rumah tangga, sehingga mengaburkan makna politiknya. Padahal, SIP adalah gerakan aktivis perempuan yang sadar, terorganisir, dan berani melakukan kritik terhadap rezim Orde Baru. Aksi ini menjadi bagian penting dari rangkaian perlawanan masyarakat yang berkontribusi pada runtuhnya Orde Baru menjelang Reformasi 1998.

Jurnal Perempuan memandang riset feminis sebagai bentuk advokasi berbasis pengetahuan untuk mendorong perubahan sosial, mulai dari kesadaran individu hingga perubahan kebijakan negara. Seluruh agenda feminisnya berangkat dari pengalaman hidup perempuan untuk mengungkap ketimpangan gender dan menuntut tanggung jawab negara. Dalam kerangka ini, aksi Suara Ibu Peduli (SIP) dipahami sebagai gerakan politik feminis yang strategis di tengah rezim Orde Baru yang represif, sekaligus sebagai kritik terhadap ibuisme negara, demokrasi yang tertutup, dan kekuasaan Soeharto (Putri et al., 2022).

Aksi SIP menunjukkan praktik politik feminis yang berbeda dari politik maskulin, dengan menggunakan simbol, bahasa lembut, dan pengalaman keseharian perempuan. Strategi ini berhasil membuka ruang bagi perempuan untuk tampil di ruang publik dengan identitas perempuan secara lebih terbuka. Setelah SIP, muncul berbagai aksi lanjutan seperti doa bersama lintas agama yang secara terang-terangan mengusung identitas perempuan, menandai meningkatnya keberanian kolektif perempuan dalam menyuarakan kritik sosial dan politik.

Dampak SIP juga terlihat pada momentum Reformasi 1998, ketika Jurnal Perempuan terlibat langsung mendukung gerakan mahasiswa. Kantor JP menjadi posko bantuan logistik yang menyalurkan ribuan nasi bungkus dan dukungan lainnya. Hal ini menegaskan bahwa Jurnal Perempuan tidak hanya berperan sebagai produsen pengetahuan feminis, tetapi juga sebagai aktor yang terlibat langsung dalam praksis politik dan perubahan sosial di Indonesia (Arivia, 2007).

Melihat Strategi Resistensi Yayasan Jurnal Perempuan dalam Perspektif James C. Scott

Teori resistensi dari James C. Scott (1989, 1990) menjelaskan bahwa dalam relasi kekuasaan antara kelompok berkuasa dan kelompok subordinat, perlawanan selalu ada dan tidak harus muncul dalam bentuk pemberontakan besar (Susilowati & Indarti, 2018). Dalam bukunya *Domination and the Arts of Resistance*, Scott (1990) menekankan bahwa resistensi sering hadir dalam bentuk kecil, tersembunyi, dan berlangsung dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika kelompok tertindas hidup di bawah tekanan dan pengawasan.

Scott memperkenalkan dua konsep utama, yaitu *public transcript* dan *hidden transcript*. *Public transcript* adalah sikap dan perilaku yang ditampilkan di ruang publik, seperti patuh dan tidak menentang, yang sering kali hanya bersifat formal atau pura-pura demi menghindari hukuman. Sebaliknya, *hidden transcript* adalah ekspresi kritik, keluhan, humor, atau penolakan yang muncul di ruang aman tanpa pengawasan kekuasaan. Bentuk ini bisa berupa ucapan maupun tindakan kecil seperti mengabaikan aturan atau melakukan penyimpangan ringan.

Selain itu, Scott menggunakan istilah *infrapolitics* untuk menggambarkan perlawanan terselubung yang tidak tampak sebagai aksi politik terbuka. Praktik-praktik ini perlahan dapat melemahkan kekuasaan dan, dalam kondisi tertentu, berubah menjadi aksi publik seperti demonstrasi atau gerakan sosial. Secara keseluruhan, teori Scott menunjukkan bahwa kelompok subordinat tidak pernah fully pasif, dan teori ini relevan untuk memahami bagaimana perempuan pada masa Orde Baru tetap melakukan resistensi meskipun ruang gerak mereka sangat dibatasi.

Dalam konteks Yayasan Jurnal Perempuan (YJP), produksi pengetahuan feminis melalui diskusi internal dan penulisan jurnal ilmiah dapat dipahami sebagai praktik *hidden transcript* sebagaimana dijelaskan oleh James C. Scott. Diskusi-diskusi internal YJP menjadi ruang aman bagi para aktivis perempuan untuk merefleksikan pengalaman mereka di bawah kebijakan negara, relasi patriarkal, serta krisis ekonomi dan politik Orde Baru. Di ruang ini, kritik terhadap negara dapat diartikulasikan secara terbuka tanpa harus berhadapan langsung dengan represi.

Artikel-artikel yang diterbitkan dalam Jurnal Perempuan juga berfungsi sebagai medium penting dalam merumuskan kritik feminis terhadap struktur kekuasaan. Dengan menjadikan pengalaman perempuan sebagai dasar analisis, riset-riset tersebut tidak hanya mendokumentasikan ketimpangan gender, tetapi juga membangun bahasa politik alternatif yang menantang wacana resmi negara. Dalam perspektif Scott, praktik ini menunjukkan bahwa *hidden transcript* dapat terwujud dalam produksi pengetahuan yang sistematis dan berkelanjutan, selama berada di luar panggung kekuasaan.

Seiring waktu, diskusi internal YJP tidak berhenti pada refleksi wacana, tetapi mulai mengarah pada perumusan kemungkinan tindakan. Kesadaran akan keterkaitan antara krisis ekonomi dan kegagalan pengelolaan negara mendorong para aktivis perempuan mencari bentuk respons yang aman namun bermakna secara politis. Dari proses ini, isu susu dipilih secara sadar sebagai simbol politik yang berangkat dari pengalaman keseharian perempuan, tetapi mengandung kritik terhadap tanggung jawab negara. Tahap ini masih berada dalam wilayah *hidden transcript*, namun telah menjadi fondasi penting bagi strategi resistensi selanjutnya.

Penjualan susu murah kemudian menjadi bentuk awal *infrapolitics*, yaitu praktik politik terselubung yang bekerja melalui aktivitas keseharian yang tampak tidak politis. Praktik ini memungkinkan YJP membawa kritik politik ke ruang publik tanpa konfrontasi langsung. Antrean panjang dan keluhan masyarakat selama penjualan susu menunjukkan bagaimana kritik terhadap kebijakan ekonomi negara mulai muncul dalam bahasa sehari-hari, sekaligus menguji batas toleransi negara terhadap kritik terselubung.

Aksi Suara Ibu Peduli (SIP) menjadi tahap lanjut dari *infrapolitics*, ketika kritik yang sebelumnya tersembunyi tampil lebih jelas namun tetap ambigu. Dengan menggunakan identitas "ibu", bahasa kepedulian, serta simbol damai, SIP memanfaatkan *political disguise* untuk menyampaikan kritik terhadap krisis ekonomi dan kegagalan negara. Reaksi negara yang tetap represif menunjukkan bahwa strategi simbolik ini berhasil mengganggu stabilitas wacana publik Orde Baru. Meski memiliki keterbatasan karena berisiko memperkuat label domestik

terhadap perempuan, SIP menandai momen penting ketika kritik feminis mulai tampil ke permukaan dan membuka ruang politik menjelang Reformasi 1998.

Kesimpulan

Pembatasan gerakan perempuan pada masa Orde Baru tidak terlepas dari stigmatisasi terhadap Gerwani pasca 1965, yang membentuk ketakutan kolektif terhadap keterlibatan perempuan dalam politik. Kondisi ini dimanfaatkan negara di bawah kepemimpinan Soeharto untuk memperkuat kontrol atas perempuan melalui kebijakan dan wacana yang menempatkan perempuan terutama sebagai ibu dan istri. Ideologi ini dikenal sebagai ibuisme negara, yang dilembagakan melalui berbagai regulasi dan program pembangunan, sehingga memperkuat relasi kuasa patriarkal dan membatasi peran perempuan di ruang publik.

Negara juga mengonsolidasikan gerakan perempuan melalui organisasi bentukan pemerintah seperti PKK, Dharma Wanita, dan Kowani yang berada dalam hegemoni politik. Meskipun secara formal negara mengakui isu perempuan melalui ratifikasi CEDAW dan pembentukan kementerian terkait, praktik pembangunan tetap berlandaskan ibuisme negara. Dampaknya, daya tawar perempuan dalam ranah politik, sosial, dan ekonomi menjadi rendah, sementara gerakan feminis kerap dipandang menyimpang dari "kodrat" perempuan.

Dalam konteks inilah Yayasan Jurnal Perempuan muncul sebagai bentuk resistensi terhadap ibuisme negara. YJP mengembangkan strategi advokasi berbasis pengetahuan melalui produksi riset feminis, penerbitan Jurnal Perempuan, diskusi publik, serta pembangunan jejaring intelektual. Selain itu, YJP terlibat dalam gerakan Suara Ibu Peduli (SIP), yang secara strategis memanfaatkan identitas keibuan untuk menyampaikan kritik terhadap krisis ekonomi, demokrasi, hak asasi manusia, dan rezim Orde Baru secara lebih luas.

Dalam perspektif James C. Scott, resistensi YJP berlangsung bertahap dari *hidden transcript* menuju *infrapolitics*. Produksi pengetahuan feminis berfungsi sebagai ruang aman untuk merumuskan kritik terhadap negara, yang kemudian dimunculkan ke ruang publik melalui praktik simbolik seperti penjualan susu murah dan aksi SIP. Meskipun menggunakan simbol keibuan yang relatif aman dan tidak konfrontatif, strategi ini berhasil mengganggu wacana resmi negara dan membuka ruang politik bagi perempuan, meskipun tetap memiliki keterbatasan karena berisiko mereproduksi pelabelan domestik terhadap perempuan.

Referensi

Achidsti, A. (2021). *Gender Gus Dur: Tonggak Kebijakan Kesetaraan Gender Era Presiden Abdurrahman Wahid*. Gading Publishing.

Akbar, M. R. (2021). Representasi Perempuan dalam Rezim Wacana Orde Baru. *Journalism, Public Relation and Media Communication Studies Journal*, 3(2), 28–47. https://doi.org/10.35706/jprmedcom.v3i2.6258.

Amaliatulwalidain, & Kencana, N. (2018). *Reposisi Kultural Organisasi PKK dari Masa Orde Baru ke Reformasi*. Jagad Riset Indonesia.

Amini, M. (2021). *Sejarah Organisasi Perempuan Indonesia (1928-1998)*. Universitas Gadjah Mada Press.

Anggraini, N. (2025). Analisis Wacana Kritis Feminis: Propaganda Gender dan Distorsi Sejarah Gerwani dalam Media Orde Baru. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*, 8(5), 566–582. https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/KAGANGA/article/view/16963.

Anshori, D. S., Kosasih, E., & Sarimaya, F. (Eds.). (1997). *Membincangkan Feminisme: Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*. Pustaka Hidayah.

Aripurnami, S. (2025). Memahami, Menyuarakan, dan Mengatasi Permasalahan Perempuan dalam Ruang Terbatas pada Masa Orde Baru Sebelum Reformasi 1998. *Jurnal Perempuan*, *30*(1), 41–51. https://doi.org/10.34309/jp.v30i1.1134.

Arivia, G. (1999). Ruang Publik dan Ruang Privat: Tinjauan Filsafat Feminis. *Jurnal Perempuan*, *4*(11), 15–28. https://doi.org/10.34309/jp.v4i11.121.

Arivia, G. (2007). Politik Representasi Suara Ibu Peduli. *Jurnal Perempuan*, *12*(55), 1–6. https://doi.org/10.34309/jp.v12i55.101.

Arivia, G., & Subono, N. I. (2017). Seratus Tahun Gerakan Perempuan Indonesia: Refleksi dan Tantangan. *Jurnal Perempuan*, *22*(2), 97–107. https://doi.org/10.34309/jp.v22i2.179.

Arivia, G., Supelli, K., & Nophiana, W. (2025). Refleksi Demonstrasi Suara Ibu Peduli: Perjuangan Aktivis Perempuan Menggulirkan Reformasi dan Melawan Orde Baru. *Jurnal Perempuan*, 30(1), 89–100. https://doi.org/10.34309/jp.v30i1.1162

Asriani. (2022). Konstruksi Keperempuanan dan Hegemoni Negara Masa Orde Baru. *Jurnal Sosial Politik*.

BKKBN. (2025). *Sejarah Program Keluarga Berencana*. Kementrian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN DIY. [suspicious link removed]

Blackburn, S. (2004). *Women and the State in Modern Indonesia*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511492167

BPHN Puslitbang. (2007). *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Optional Protocol CEDAW Terhadap Hukum Nasional Yang Berdampak Pada Pemberdayaan Perempuan*. Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Budianta, M. (2006). The Blessed Mother in the People's Market: Urban Politics in Crisis Time. *Asian Studies Review*, 30(4), 335–346. https://doi.org/10.1080/10357820601040685

Dewi, V. K., & Kasuma, G. (2014). Perempuan Masa Orde baru (Studi Kebijakan PKK dan KB Tahun 1968-1983). *Verleden: Jurnal Kesejarahan*, 4(2), 157–172.

Djoeffan, S. H. (2001). Gerakan Feminisme di Indonesia: Tantangan dan Strategi Mendatang. *Mimbar: Jurnal Sosiologi dan Pembangunan*, 17(3), 284–300. https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/49

Fakih, M. (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.

Fathimah, S. (2021). *Negara dan Perempuan: Representasi Politik Perempuan Masa Orde Baru*. Rajawali Press.

Fatimah, S. (2007). Perempuan dan Kekerasan pada Masa Orde Baru. *Demokrasi*, VI(2), 99–100.

Fitalaya, A. (1997). Konstruksi Ideologi Gender Orde Baru dan Implikasinya Terhadap Pembagian Kerja Gender. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4(1), 45–58.

Gunharsa, D. E., Cahyadi, J., Rizki, R. S., & Papia, H. A. N. P. (2022). Analisa Hubungan Kasus Marsinah Terhadap Pelanggaran Sila Pancasila Ke 2 dan 5. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humaniora*, 1(2), 1–25.

Hadiz, L. (2004). *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru: Pilihan Artikel Prisma*. LP3ES.

Hendrastiti, T. K., & Irianto, S. (2025). Gerakan Perempuan Tanpa Label: Menemukan Feminis Subaltern di Indonesia Pra-Reformasi. *Jurnal Perempuan*, 30(1), 53–61. https://doi.org/10.34309/jp.v30i1.1139

Hidayat, A. (2018). Perkembangan Partai Politik Pada Masa Orde Baru (1966-1998). *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 17(2), 155–164. https://doi.org/10.21009/jimd.v17i2.9090

Husna, A. R., & Adiyuka, A. A. (2025). Antagonisasi Gerwani dan Ibuisme Negara: Strategi Rezim Orde Baru Membentuk Ingatan Kolektif dan Hegemoni Gender. *Jurnal Perempuan*, 30(1), 13–24. https://doi.org/10.34309/jp.v30i1.1117.

Hutagalung, D. (2004). Hegemoni, Kekuasaan, dan Ideologi. *Diponegoro 74: Jurnal Pemikiran Sosial, Politik, dan Hak Asasi Manusia*, 12.

Jati, W. R. (2014). Historisitas Politik Perempuan Indonesia. *Paramita: Historical Studies Journal*, 24(2), 200–210. https://doi.org/10.15294/paramita.v24i2.3123

Katjasungkana, N. (2025). Menjembatani Luka Perempuan ke Arah Pembebasan dan Perubahan Kebijakan. *Jurnal Perempuan*, 30(1), 25–40. https://doi.org/10.34309/jp.v30i1.1152.

Katjasungkana, N., & Wieringa, S. E. (2003). Penerapan CEDAW dan Pembatasan Hak-Hak Perempuan di Indonesia. *Jurnal Perempuan*, *31*, 15–32. https://doi.org/10.34309/jp.v0i31.144.

KemenPPPA. (2025). *Sejarah KemenPPPA Republik Indonesia*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Kleden, I. (2001). *Menulis Politik: Indonesia Sebagai Utopia*. Kompas.

Kuntowijoyo. (1994). *Metodologi Sejarah*. Tiara Wacana.

Martyn, E. (2005). *The Women's Movement in Post-Colonial Indonesia: Gender, Nationalism and State Policy, 1919-1949*. Routledge.

Novitasari, M., & Soetjipto, A. W. (2025). Antagonisasi Gerwani dan Ibuisme Negara: Strategi Rezim Orde Baru Membentuk Ingatan Kolektif dan Hegemoni Gender. *Jurnal Perempuan*, *30*(1), 13–24. https://doi.org/10.34309/jp.v30i1.1117.

Novitasari, M., & Soetjipto, A. W. (2025). Peran Organisasi Perempuan dalam Perjuangan Kemerdekaan dan Perjuangan Pembentukan Negara Bangsa di

Indonesia. *Jurnal Perempuan, 30*(1), 1–12. https://doi.org/10.34309/jp.v30i1.1144

Pradita, S. M. (2020). Sejarah Pergerakan Perempuan Indonesia Abad 19-20. *Chronologia: Journal of History Education*, *2*(2), 12–24. https://doi.org/10.22236/jhe.v2i2.6060.

Printina, B. I. (2019). *Merawat Memori Memupuk Kebangsaan: Komitmen Pada Cita-Cita Kaum Perempuan*. Direktorat Sejarah Kemendikbud Republik Indonesia.

Putri, R. D. D. G. S., Boang Manalu, A. G., & Subono, N. I. (2022). Aktivis Feminis Akademik: Pengetahuan Perempuan untuk Resistensi, Harapan, dan Perubahan Sosial (Kontribusi Jurnal Perempuan dalam Membangun Diskursus Feminisme di Indonesia). *Jurnal Perempuan*, *27*(2), 113–128. https://doi.org/10.34309/jp.v27i2.693.

Rachmadi, M. S. (2019). *Kebijakan dan Implementasi Program Keluarga Berencana di Kota Semarang 1970-1999* [Skripsi, Universitas Diponegoro].

Rizqi, R. (2022). Efektifitas Penyederhanaan Partai Politik Era Orde Baru. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, *1*(3), 204–211. https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet/article/view/371.

Robinson, R. (2012). *Soeharto & Bangkitnya Kapitalisme Indonesia* (Harsutejo, Penerj.). Komunitas Bambu.

Scott, J. C. (1989). *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsitensi di Asia Tenggara*. LP3ES.

Scott, J. C. (1990). *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*. Yale University Press.

Setiyawan, R., & Wahyuni, H. I. (2023). Gender dan Ekologi dalam Pendidikan Indonesia Masa Orde Baru dan Pasca Reformasi: Perspektif Ekofeminisme. *HUMANIS: Journal of Arts and Humanities*, *27*(1), 75–89. https://doi.org/10.24843/jh.2023.v27.i01.p08.

Subono, N. I. (1999). *Catatan Perjalanan Suara Ibu Peduli*. Yayasan Jurnal Perempuan.

Suryakusuma, J. I. (1996). The State and Sexuality in New Order Indonesia. Dalam L. Sears (Ed.), *Fantasizing the Center: Positionings of Gender in Change: Gender and Sexuality in Indonesia* (pp. 92–119). Duke University Press.

Suryakusuma, J. I. (2011). *Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan di Indonesia*. Komunitas Bambu.

Susilowati, E. Z., & Indarti, T. (2018). Resistensi Perempuan dalam Kumpulan Cerita Tandak Karya Royyan Julian (Teori Resistensi James C. Scott). *BAPALA: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 5*(2), 1–11.

Udasmoro, W. (2004). Konsep Nasionalisme dan Hak Reproduksi Perempuan: Analisis Gender Terhadap Program Keluarga Berencana di Indonesia. *Humaniora*, *16*(2), 147–154. https://journal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/view/814

Wardhana, A. P. S. (2017). Pahlawan yang Terlupakan: Kader Keluarga Berencana (KB) dalam Politik Seksualitas di Surakarta (1973-1998). *Jurnal Perempuan*, *22*(2), 119–128.

Wieringa, S. E. (1988). Abortion and the Global Color Line. *Bulletin of Concerned Asian Scholars*.

Wieringa, S. E. (1993). Two Indonesian Women's Organizations: Gerwani and the PKK. *Bulletin of Concerned Asian Scholars*, *25*(2), 17–30. https://doi.org/10.1080/14672715.1993.10416113

Wieringa, S. E. (2002). *Sexual Politics in Indonesia*. Palgrave Macmillan.

Wieringa, S. E. (2010). *Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pasca Kejatuhan PKI* (Harsutejo, Penerj.). Galangpress.

Winarnita, M. (2007). The 'Motherhood' Strategy of Indonesia's Suara Ibu Peduli. Dalam *Building Feminist Movements and Organizations: Global Perspectives* (pp. 209–218). Zed Books Ltd.

Wirahmat, H., & Alfiyani, N. (2022). Eksistensi Politik Perempuan Pasca Kemerdekaan Indonesia. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children*, *2*(2), 114–131.

Yayasan Jurnal Perempuan. (1995). *Profil Yayasan Jurnal Perempuan*. Yayasan Jurnal Perempuan.

Yayasan Jurnal Perempuan. (n.d.). *Profil Yayasan Jurnal Perempuan*. https://www.jurnalperempuan.org/profil.html. Diakses 25 Desember 2025.